



Article Informations
Corresponding Email:
nikitasalsabila212@gmail.com

Received: 02/02/2025; Accepted:
13/02/2025; Published: 30/06/2025

REVITALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTAR NEGARA- NEGARA GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) PASCA AL-ULA SUMMIT PADA TAHUN 2021

Nikita Salsabila¹⁾, Suwarti Sari²⁾, Anggun Dwi Panorama³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak, langkah, tantangan dan prospek revitalisasi hubungan antar negara-negara *Gulf Cooperation Councils* pasca *Al-Ula Summit* pada tahun 2021 dengan menggunakan Pendekatan neorealis, Konsep Kepentingan nasional dan utamanya *Regional Security Complex Theory (RSCT)*. Penelitian ini kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif, tipe penelitian deskriptif analitis dan pengumpulan data melalui studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa rekonsiliasi GCC melalui *Al-Ula Summit* berhasil meredakan ketegangan diplomatik dan membuka kembali jalur komunikasi yang sebelumnya terhambat oleh blokade terhadap Qatar. Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa revitalisasi hubungan ini belum sepenuhnya mampu menciptakan stabilitas jangka panjang. Masih terdapat fragmentasi dalam kepentingan nasional, pengaruh aktor eksternal seperti Iran dan Amerika Serikat, serta perbedaan kebijakan luar negeri antar anggota GCC.

Kata Kunci: *Al-Ula Summit, Gulf cooperation Councils, Regional Security Complex Theory (RSCT)*

Abstract

This study aims to analyze the impact, measures, challenges, and prospects of revitalizing diplomatic relations among Gulf Cooperation Council (GCC) member states following the Al-Ula Summit in 2021. The research employs a neorealist approach, the concept of national interest, and primarily the Regional Security Complex Theory (RSCT). This study adopts a qualitative research method, with a descriptive-analytical research type and data collection through literature review. The findings indicate that the GCC reconciliation through the Al-Ula Summit successfully eased diplomatic tensions and reopened communication channels previously hindered by the blockade

against Qatar. However, the analysis also reveals that this revitalization has not yet fully achieved long term stability. Fragmentation in national interests, the influence of external actors such as Iran and the United States, and differing foreign policies among GCC members remain significant challenges

Keywords: Al-Ula Summit, Gulf cooperation Councils, Regional Security Complex (RSCT)

PENDAHULUAN

Timur Tengah merupakan wilayah strategis yang terletak diantara tiga benua, yaitu Asia, Eropa dan Afrika. Kawasan ini dikenal sebagai kawasan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di wilayah Teluk. Di sisi lain, kekayaan sumber daya yang melimpah tersebut kerap menjadi pemicu permasalahan lain, yaitu konflik regional maupun global (Notodewo, p. 56-69, 2021). *Gulf Cooperation Council (GCC)* merupakan sebuah organisasi regional yang berdiri pada tahun 1981. Beranggotakan enam negara di kawasan Teluk Persia, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman, GCC bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan guna menciptakan stabilitas di kawasan Teluk. Namun, di tengah upaya untuk membangun persatuan kawasan, GCC kerap menghadapi tantangan akibat konflik kepentingan antar anggota yang berimplikasi pada hubungan diplomatik dan stabilitas regional (Christie, p. 7-20, 2019).

Meskipun GCC berperan sebagai forum kerja sama di kawasan Teluk, perbedaan kebijakan luar negeri antar anggota tetap menjadi tantangan. Ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif mendorong negara anggota bertindak sepihak dalam menghadapi ketegangan politik. Akibatnya, GCC lebih menyerupai blok ekonomi daripada aliansi politik yang solid, berbeda dengan Uni Eropa atau ASEAN yang memiliki prosedur resolusi konflik yang lebih terstruktur (Christie, p 7-20, 2019). Salah satu konflik terbesar di GCC terjadi pada 2017 ketika Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir memberlakukan blokade terhadap Qatar, menuduhnya mendukung kelompok ekstremis dan menjalin hubungan terlalu erat dengan Iran. Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Qatar diisolasi secara diplomatik dan ekonomi, dengan pembatasan akses darat, laut, dan udara. Blokade ini tidak hanya berdampak pada Qatar tetapi juga memicu

ketegangan dalam kerja sama antar anggota GCC (Kabalan, p. 51-59, 2021).

Pada awalnya, blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir bertujuan untuk menekan Qatar agar menyesuaikan kebijakan luar negerinya, terutama terkait Iran. Namun, hasilnya justru berlawanan. Qatar berhasil bertahan dan secara cepat mempererat hubungan dagang dengan Iran dan Turki. Ketiganya juga berhasil meningkatkan kemandirian melalui investasi di sektor pangan dan infrastruktur. Keberhasilan ini menunjukkan kegagalan blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir dalam mencapai tujuan politiknya. Sebaliknya blokade ini justru malah melemahkan solidaritas negara anggota GCC (Kabalan, p. 51-59, 2021). Blokade ini menunjukkan bahwa perbedaan kebijakan luar negeri di antara negara-negara anggota GCC dapat memicu krisis yang mengancam solidaritas kawasan.

Blokade justru berdampak pada memperburuknya ketegangan regional di Kawasan Teluk. Hal ini tentu saja menyoroti kerentanan GCC sebagai organisasi yang seharusnya menjaga stabilitas dan harmoni anggotanya (Ulrichsen, 2018). Namun, di sisi lain faktor politik dan diplomatik, dampak ekonomi kemudian turut mendorong diadakannya rekonsiliasi. Selain itu, krisis global, fluktuasi harga minyak, dan pandemi COVID-19 juga memperjelas kerugian finansial bagi semua pihak. Arab Saudi dan UEA kehilangan pasar ekspor ke Qatar, sementara perusahaan Dubai terdampak akibat terbatasnya akses perdagangan. Perpecahan juga melemahkan sektor penerbangan, perbankan, dan investasi di Teluk. Melihat hal ini, pada akhirnya negara-negara GCC menyadari bahwa rekonsiliasi merupakan jalan yang lebih menguntungkan daripada konflik yang berlarut-larut (Kabalan, p. 56, 2021).

Blokade Qatar telah memperlihatkan kerentanan solidaritas GCC akibat konflik internal, di mana perbedaan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri dapat berakibat pada ketegangan. Meskipun GCC berfungsi sebagai platform untuk mengatasi krisis dan memperkuat kerja sama antar anggota, perbedaan kepentingan masih menjadi penghambat proses rekonsiliasi. Dalam hal ini, sebagai upaya mediasi, pada 5 Januari 2021 GCC mengadakan *Al Ula Summit* di Arab Saudi, yang mengakhiri blokade lebih

dari tiga tahun yang dilakukan oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar. Dalam KTT ini, disepakati Al Ula *Declaration* yang membuka kembali perbatasan dan hubungan diplomatik antara Qatar dan negara-negara pemblokade, serta memperkuat stabilitas kawasan Teluk yang telah terganggu sejak 2017 (Siahaan, p. 208, 2023).

Revitalisasi hubungan diplomatik pasca-Al-Ula *Summit* menimbulkan berbagai pertanyaan penting. Sebagian besar penelitian sebelumnya fokus pada dampak blokade Qatar terhadap stabilitas kawasan dan hubungan bilateral. Namun sedikit yang mengevaluasi efektivitas Al-Ula *Summit* dalam memperkuat solidaritas dan integrasi regional. Selain itu, masih belum jelas juga terkait bagaimana GCC dapat mempertahankan stabilitas jangka panjang di tengah konflik kepentingan antara anggota dan dinamika geopolitik global.

Meskipun blokade secara resmi telah berakhir, namun tantangan dalam implementasi rekonsiliasi masih tetap ada. Pemulihan hubungan diplomatik tidak serta merta menghapus ketidakpercayaan yang telah terbangun selama bertahun-tahun di antara negara-negara GCC. Selain itu, ketidakjelasan tentang permanennya rekonsiliasi juga tetap ada mengingat perbedaan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional yang masih dapat memicu ketegangan di masa depan. Dalam kondisi seperti ini, penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai efektivitas GCC sebagai organisasi yang mampu menyelesaikan konflik internal secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis proses revitalisasi hubungan diplomatik pasca-Al-Ula *Summit*, mengevaluasi langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama regional, serta tantangan dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memahami tentang bagaimana revitalisasi hubungan diplomatik antar negara-negara *Gulf Cooperation Council (GCC)* pasca Al-Ula-*Summit* pada tahun 2021. Hal ini menyangkut prospek integrasi kawasan Teluk Persia dan relevansi GCC sebagai organisasi regional di tengah perubahan tatanan dunia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sehingga peneliti dapat memahami makna dari suatu fenomena secara

mendalam, menyeluruh dan holistik. Tipe penelitian deskriptif analisis digunakan dalam penelitian ini untuk membuat deskripsi penelitian secara sistematis, akurat dan faktual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, menggunakan pendekatan neorealis, konsep kepentingan nasional dan *Regional Security Complex Theory (RSCT)* dari Barry Buzan dan Ole Wæver. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Ula Summit berhasil meredakan ketegangan diplomatik di GCC dan memulihkan komunikasi yang terhambat akibat blokade Qatar. Namun, revitalisasi ini belum sepenuhnya menjamin stabilitas jangka panjang karena masih adanya perbedaan kepentingan nasional, pengaruh aktor eksternal seperti Iran dan AS, serta kebijakan luar negeri yang beragam di antara anggota GCC.

PEMBAHASAN

Konteks Revitalisasi Hubungan Diplomatik Gulf Cooperation Council (GCC) Pasca-Al-Ula Summit

Al-Ula Summit yang diadakan pada 5 Januari 2021 di Arab Saudi menandai momen penting dalam sejarah hubungan diplomatik GCC. Setelah lebih dari tiga tahun ketegangan akibat blokade Qatar sejak 2017, pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Al-Ula yang mengakhiri isolasi Qatar dan membuka kembali hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara pemblokade seperti Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir. Deklarasi ini menjadi langkah penting dalam revitalisasi hubungan di kawasan Teluk. Namun, penelitian ini mengkritisi apakah deklarasi tersebut mencerminkan rekonsiliasi sejati atau hanya manuver pragmatis yang dipengaruhi tekanan geopolitik dan ekonomi, yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian selanjutnya. Pada dasarnya Al-Ula Summit menghasilkan Deklarasi Al-Ula yang mencakup beberapa komitmen utama untuk normalisasi hubungan antara Qatar dan negara-negara pemblokade, yaitu:

- 1) Komitmen terhadap kedaulatan dan keamanan kolektif,
- 2) Penghapusan blokade dan normalisasi hubungan diplomatik,
- 3) Kerja sama dalam keamanan dan media,
- 4) Peningkatan koordinasi bilateral dan penyelesaian sengketa melalui diplomasi.

Deklarasi ini menegaskan komitmen anggota GCC untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara dan menghindari intervensi dalam urusan

domestik. Salah satu alasan blokade Qatar pada 2017 adalah tuduhan dukungan terhadap kelompok Islamis dan hubungan erat dengan Iran, yang dianggap ancaman oleh Arab Saudi dan sekutunya (Carjouli, 2021). Oleh karena itu, GCC berjanji untuk menghindari kebijakan yang dapat memicu ketegangan baru dan menegaskan kembali prinsip saling menghormati kedaulatan. Salah satu poin utama dalam Deklarasi Al-Ula adalah penghentian semua pembatasan terhadap Qatar dalam waktu satu minggu setelah penandatanganan, termasuk pembukaan kembali jalur darat, laut, dan udara, serta pemulihan hubungan diplomatik penuh dengan negara-negara pemblokade. Selain itu, klaim hukum terkait blokade dihentikan dalam waktu satu tahun (Carjouli, 2021). Normalisasi ini juga bertujuan untuk meredakan ketegangan politik dan mengembalikan stabilitas ekonomi yang terganggu (Kabalan, p. 23, 2021). Negara-negara GCC juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam menghadapi ancaman keamanan, termasuk terorisme dan serangan siber. Terkait media, terutama Al Jazeera yang sebelumnya menjadi kontroversi, GCC telah berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi guna mencegah penyebaran informasi yang memperburuk hubungan antarnegara (Miller, p. 36-45, 2019).

Deklarasi Al-Ula menekankan pentingnya dialog dan kerja sama bilateral untuk menyelesaikan sengketa di masa depan. Negara-negara GCC sepakat membentuk dua komite: satu untuk memantau implementasi deklarasi, dan satu lagi untuk menyelesaikan sengketa hukum. Tujuan mekanisme ini adalah memastikan rekonsiliasi berjalan efektif dan mencegah konflik serupa (Gardner, 2021). Pada 19 Juni 2023, Qatar dan UEA membuka kembali kedutaan besar mereka, menandai puncak normalisasi hubungan setelah perselisihan antara “Arab Quartet” dan Qatar. Bahrain belum mengikuti, meskipun normalisasi dengan Qatar diperkirakan segera terjadi. Langkah ini menggambarkan upaya untuk memperkuat solidaritas regional, meskipun hambatan tetap masih ada. Deklarasi Al-Ula juga menegaskan kembali komitmen untuk menyelesaikan proyek ekonomi bersama, seperti Uni Bea Cukai GCC dan Pasar Bersama Teluk (Bouoiyour, 2019).

Namun, meskipun hubungan diplomatik telah dinormalisasi, tantangan dalam menjaga stabilitas jangka panjang dan mencegah konflik serupa tetap

menjadi perdebatan. Dalam konteks neorealisme, kepentingan nasional dan keseimbangan kekuatan akan terus mempengaruhi kebijakan luar negeri GCC. Dari sudut pandang *Regional Security Complex Theory*, konflik internal GCC dapat merusak sistem keamanan regional karena kawasan Teluk masih memiliki pola interdependensi keamanan yang kompleks (Fahlander, 2011). Tanpa mekanisme penyelesaian konflik yang kuat, GCC tetap rentan terhadap perpecahan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, revitalisasi hubungan pasca-Al-Ula lebih dipandang sebagai langkah pragmatis daripada rekonsiliasi berbasis kepercayaan. Keberhasilan jangka panjang Deklarasi Al-Ula juga masih bergantung pada implementasi komitmen negara-negara GCC.

Dinamika Keamanan Regional dan Revitalisasi *Gulf Cooperation Council* (GCC)

Pasca-Al-Ula *Summit* 2021, keamanan kawasan Teluk mengalami perubahan signifikan. Revitalisasi hubungan antar negara GCC membawa dampak strategis yang kompleks terhadap stabilitas regional, baik secara internal maupun eksternal. Namun, efektivitasnya dalam menciptakan stabilitas jangka panjang masih diperdebatkan, mengingat perbedaan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional yang tetap ada (Miller, p. 36-35, 2019). Pasca-rekonsiliasi, GCC mengambil langkah untuk memperkuat stabilitas regional dengan meningkatkan koordinasi keamanan dan pertahanan kolektif terhadap ancaman eksternal. Kerja sama intelijen juga diperkuat untuk menghadapi kelompok militan serta pengaruh Iran dan Turki. Namun, membangun kembali kepercayaan tetap menjadi tantangan utama, mengingat blokade Qatar sempat menciptakan kesan bahwa aliansi GCC bersifat transaksional dan rentan terhadap perpecahan (Tığlıoğlu, 2023).

Ancaman Iran menjadi faktor utama yang mendorong rekonsiliasi GCC. Sebagai kekuatan regional, Iran memperluas pengaruhnya melalui aliansi dengan kelompok Syiah di Irak, Suriah, dan Lebanon serta dukungan terhadap Houthi di Yaman, yang memicu ketegangan dengan Arab Saudi, UEA, dan Bahrain. Rekonsiliasi GCC pun dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat solidaritas menghadapi ancaman Iran (Tığlıoğlu, 2023). Selain itu, perubahan kebijakan luar negeri AS juga berperan dalam

revitalisasi GCC. Jika di era Trump AS mendukung blokade Qatar, pemerintahan Biden justru mendorong persatuan di antara sekutu-sekutunya guna menghambat pengaruh Iran dan aktor lain yang berseberangan dengan kepentingan AS di Timur Tengah (Ulrichsen, 2021).

Di sisi lain revitalisasi GCC telah mengubah keseimbangan kekuatan regional. Sebelum blokade, Arab Saudi dan UEA mendominasi GCC, sementara Qatar cenderung bersikap independen. Namun, keberhasilan Qatar bertahan selama blokade justru memperkuat posisinya, membangun aliansi dengan Turki dan Iran, serta memperkuat kemandirian ekonominya. Kini, kekuatan di GCC tidak lagi terpusat pada Arab Saudi dan UEA, tetapi semakin multipolar dengan Qatar sebagai aktor yang semakin berpengaruh (Roberts, 2022). Selain itu, rekonsiliasi juga berdampak pada hubungan Arab Saudi dan UEA. Meskipun keduanya memimpin kawasan, terdapat perbedaan strategi dalam menyikapi Qatar. Arab Saudi lebih terbuka terhadap normalisasi hubungan demi stabilitas regional, sedangkan UEA masih skeptis, terutama terkait hubungan Qatar dengan Ikhwanul Muslimin dan peran Al Jazeera (Gause III, p. 27, 2022).

Meskipun Deklarasi Al-Ula menjadi langkah penting dalam memulihkan solidaritas GCC, stabilitas jangka panjang tetap bergantung pada bagaimana negara-negara anggota mengelola perbedaan kepentingan. Tanpa mekanisme kerja sama yang lebih efektif, ketegangan lama bisa kembali muncul, terutama terkait kebijakan luar negeri dan persaingan ekonomi antara Qatar, Arab Saudi, dan UEA. Oleh karena itu, stabilitas GCC membutuhkan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih institusional serta koordinasi kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih kuat. Meski demikian, secara keseluruhan revitalisasi GCC pasca-Al-Ula *Summit* membawa perubahan besar dalam dinamika keamanan regional dengan catatan bahwa ancaman eksternal seperti Iran serta dinamika hubungan dengan AS tetap menjadi faktor kunci dalam menentukan stabilitas kawasan. Pergeseran keseimbangan kekuatan juga menciptakan hubungan yang lebih multipolar di dalam GCC, yang dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi integrasi kawasan. Oleh karena itu, efektivitas rekonsiliasi tidak hanya bergantung pada pencabutan blokade, tetapi juga pada keberhasilan negara-

negara GCC dalam membangun kerja sama keamanan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Tantangan dan Prospek Revitalisasi *Gulf Cooperation Council (GCC)*

Keberhasilan Al-Ula *Summit* menjadi momentum penting dalam rekonsiliasi diplomatik negara-negara GCC, namun mempertahankan stabilitas jangka panjang memerlukan lebih dari sekadar normalisasi hubungan. Ketidakpercayaan historis, perbedaan kebijakan luar negeri, dan dinamika geopolitik eksternal masih menjadi tantangan utama. Selain itu, kelemahan institusional GCC dalam menyelesaikan konflik internal serta persaingan ekonomi, khususnya antara Qatar sebagai eksportir LNG dan Arab Saudi-UEA di sektor minyak, semakin memperumit kohesi regional. Tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat, GCC tetap rentan terhadap perpecahan di masa depan (Gause III, p. 27, 2022).

Pasca Al-Ula *Summit*, negara-negara anggota GCC juga menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks akibat perbedaan pendekatan terhadap Iran, pergeseran fokus strategis Amerika Serikat ke Indo-Pasifik, dan meningkatnya keterlibatan ekonomi China di Teluk. Ketidaksepakatan dalam menghadapi Iran memicu ketegangan dalam formulasi kebijakan bersama. Qatar dan Oman memilih pendekatan yang lebih diplomatis, sementara Arab Saudi dan UEA cenderung bersikap konfrontatif (Ulrichsen, 2021). Sementara ketergantungan negara anggota GCC pada AS telah melemahkan kemandirian pertahanan GCC. Konsekuensinya, GCC harus mempertimbangkan diversifikasi kemitraan strategis, termasuk meningkatkan kerja sama dengan Uni Eropa dan negara-negara Asia untuk memperkuat otonomi keamanannya. Selain itu, investasi dan perdagangan dengan China berpotensi memperkuat kerja sama ekonomi, tetapi juga menimbulkan dinamika baru yang dapat memperburuk fragmentasi kebijakan luar negeri.

Revitalisasi hubungan di GCC tidak hanya tergantung pada rekonsiliasi politik, tetapi juga pada kemampuan negara-negara anggota mengelola perbedaan kepentingan dan membangun kepercayaan dalam diplomasi. Dengan pendekatan yang sistematis, GCC memiliki peluang

memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas kawasan Teluk. Keberhasilan revitalisasi ini bergantung pada komitmen untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, keamanan, serta mekanisme resolusi konflik yang adaptif. Meskipun ada tantangan seperti ketidakpercayaan, perbedaan kebijakan luar negeri, dan ketergantungan pada aktor eksternal, peluang untuk memperkuat kerja sama regional tetap ada. Untuk menilai apakah revitalisasi ini akan menciptakan stabilitas jangka panjang atau hanya respons sementara, perlu dilakukan analisis dengan pendekatan *Regional Security Complex Theory (RSCT)* yang akan mengevaluasi dampak perubahan dinamika keamanan di kawasan Teluk terhadap sistem keamanan regional.

Analisis Revitalisasi *Gulf Cooperation Council (GCC)* Berdasarkan Empat Variabel Utama *Regional Security Complex Theory (Buzan & Waever)*

Teori *Regional Security Complex Theory (RSCT)* yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver merupakan pendekatan utama untuk menganalisis dinamika keamanan di kawasan Teluk. RSCT menjelaskan terbentuknya keamanan regional melalui interaksi negara-negara yang saling bergantung dalam kompleks keamanan. Dalam konteks revitalisasi GCC pasca-Al-Ula *Summit* 2021, RSCT menawarkan kerangka untuk memahami sejauh mana perubahan hubungan antarnegara di GCC mempengaruhi tatanan keamanan regional. Empat variabel utama dalam RSCT meliputi *Boundary*, *Anarchic Structure*, *Polarity*, dan *Social Construction* (Buzan dan Waever, 2003).

1) Variabel *Boundary*

Konsep *boundary* dalam RSCT mengacu pada kejelasan batas keamanan suatu kawasan. Dalam GCC, rekonsiliasi pasca-Al-Ula *Summit* bertujuan memperkuat batas keamanan regional dan solidaritas negara Teluk. Namun, dinamika politik dan keamanan menunjukkan bahwa batas tersebut masih rentan terhadap intervensi eksternal. Iran tetap menjadi faktor destabilisasi di kawasan dengan memperluas pengaruhnya melalui kelompok proksi seperti Houthi dan Hizbullah di

Lebanon. Sementara itu, dominasi militer AS di Teluk turut memperumit batas keamanan GCC. Perbedaan pendekatan antar anggota, dengan Qatar dan Oman bersikap lebih fleksibel terhadap Iran, sementara Arab Saudi dan UEA lebih konfrontatif, membuat revitalisasi GCC belum mampu memperkuat sistem keamanan regional secara kohesif. Dalam hal ini masih terlihat perbedaan kepentingan dan strategi di antara negara-negara anggotanya.

Dalam konteks GCC, rekonsiliasi pasca-Al-Ula *Summit* seharusnya memperkuat batas keamanan regional dengan membangun kembali solidaritas antarnegara Teluk. Namun, realitas menunjukkan bahwa batas keamanan GCC masih rentan terhadap pengaruh eksternal, terutama dari Iran, Amerika Serikat, dan kekuatan global lainnya. Iran tetap menjadi faktor yang menantang stabilitas GCC dengan memperluas pengaruhnya melalui aliansi strategis di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Sementara itu, Amerika Serikat yang secara historis menjadi pelindung utama GCC semakin mengalihkan fokusnya ke kawasan Indo-Pasifik. Hal tersebut kemudian memaksa negara-negara GCC untuk mempertimbangkan diversifikasi aliansi keamanan mereka (Alkuwari, 2020).

2) Variabel *Anarchic Structure*

Dalam konsep RSCT, *anarchic structure* merujuk pada kondisi di mana tidak ada satu otoritas tunggal yang mengendalikan sistem keamanan regional. Hal ini menyebabkan negara-negara anggota harus menavigasi kepentingannya secara independen. Revitalisasi GCC tidak serta-merta menghilangkan kondisi anarki dalam organisasi ini, karena tidak ada kepemimpinan absolut yang diterima secara menyeluruh oleh seluruh anggota GCC. Arab Saudi tetap menjadi kekuatan utama di GCC, meskipun dominasinya tidak sepenuhnya diterima oleh negara lainnya. Sementara Qatar semakin mandiri pasca-

blokade 2017-2021 dengan mempererat hubungan dengan Turki dan Iran dan menandakan resistensi terhadap pengaruh Arab Saudi dan UEA. Sementara itu, Kuwait dan Oman berperan sebagai mediator netral. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi GCC tidak menghilangkan struktur anarki, melainkan mendorong persaingan kekuasaan yang lebih dinamis di antara anggotanya.

Anarchic structure juga merujuk pada kondisi di mana tidak ada satu otoritas tunggal yang mengendalikan sistem keamanan regional. Revitalisasi GCC tidak serta-merta menghilangkan struktur anarki di Teluk karena tidak ada kepemimpinan absolut dalam organisasi ini. Arab Saudi dan UEA masih menjadi kekuatan dominan, tetapi pengaruh Qatar semakin meningkat setelah berhasil bertahan dari blokade 2017-2021 (Tığlıoğlu, p. 75, 2023). Revitalisasi GCC bertujuan membangun keseimbangan kepemimpinan, tetapi tetap menghadapi tantangan internal. Arab Saudi yang berupaya menjadi pemimpin utama, sementara UEA menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih independen. Di sisi lain Qatar semakin memperkuat otonominya melalui hubungan strategis dengan Turki dan Iran. Situasi ini pun menunjukkan bahwa GCC masih berada dalam struktur anarki, dengan keseimbangan kekuatan yang terus berubah tanpa kendali penuh dari satu negara.

3) Variabel *Polarity*

Polarity dalam RSCT mengacu pada bagaimana kekuatan didistribusikan di dalam kompleks keamanan regional. Sebelum krisis GCC 2017, sistem keamanan Teluk cenderung bersifat bipolar, dengan Arab Saudi dan UEA di satu sisi dan Qatar di sisi lain. Setelah rekonsiliasi Al-Ula, sistem ini mengalami perubahan signifikan menuju bentuk multipolaritas yang lebih kompleks. Qatar kini memainkan peran lebih signifikan dalam

keseimbangan kekuatan, membangun aliansi dengan Turki dan Iran.

Arab Saudi tetap menjadi pemimpin *de facto* GCC, namun menghadapi tantangan dari Qatar yang semakin mandiri dalam diplomasi regional. Di sisi lain, UEA juga mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih independen, mempererat hubungan dengan Israel dan memperluas pengaruh di Afrika Utara. Fragmentasi kebijakan luar negeri GCC ini menunjukkan bahwa pasca-rekonsiliasi tidak ada satu negara yang dapat mendominasi sistem keamanan Teluk, namun justru menciptakan dinamika kekuasaan yang lebih kompleks dan kompetitif (Tıglioğlu, p. 78, 2023).

Polarity dalam RSCT mengacu pada distribusi kekuatan dalam sistem keamanan regional. Sebelum krisis GCC 2017, sistem ini bersifat bipolar, dengan Arab Saudi dan UEA di satu sisi dan Qatar di sisi lain. Setelah rekonsiliasi Al-Ula, sistem berubah menjadi lebih multipolar, dengan Qatar kini memiliki peran lebih besar dalam perimbangan kekuatan. Meskipun Arab Saudi dan UEA tetap dominan, Qatar kini lebih fleksibel dalam diplomasi regional. Namun, meskipun ada pergeseran menuju multipolaritas, fragmentasi kebijakan luar negeri tetap ada, terutama terkait hubungan dengan Iran dan Turki yang menjadikan sistem keamanan regional tetap tidak stabil dan rentan terhadap perubahan.

4) Variabel *Social Construction*

Variabel *social construction* berfokus pada bagaimana identitas kolektif terbentuk dalam suatu kompleks keamanan regional. Salah satu tujuan utama GCC adalah membangun identitas keamanan kolektif di antara negara-negara anggotanya. Namun, realitas menunjukkan bahwa meskipun revitalisasi hubungan diplomatik telah terjadi, identitas bersama dalam GCC masih mengalami tantangan serius. Lemahnya konstruksi

sosial di GCC terlihat dari perbedaan kebijakan luar negeri yang mencolok antar anggota.

Qatar misalnya, tetap membuka diplomasi dengan Iran dan Turki, sementara Arab Saudi dan UEA melihat Iran sebagai ancaman. Perbedaan ini mempengaruhi kerja sama keamanan dan memperkuat identitas nasional daripada kolektif. Media juga berperan dalam membentuk persepsi identitas GCC, dengan kampanye propaganda selama blokade Qatar yang memperburuk ketegangan. Meskipun hubungan diplomatik telah normal, narasi identitas masyarakat masih terbelah. Oleh karena itu, meskipun revitalisasi hubungan GCC memberikan harapan, solidaritas kolektif dalam keamanan kawasan masih memerlukan waktu dan upaya lebih lanjut.

Social construction dalam RSCT melihat bagaimana identitas kolektif terbentuk dalam kompleks keamanan regional. Salah satu tujuan utama GCC adalah menciptakan identitas keamanan kolektif, namun krisis GCC 2017 menunjukkan bahwa identitas ini masih rentan terhadap perpecahan internal. Revitalisasi hubungan diplomatik pasca-Al-Ula berupaya membangun kembali solidaritas dalam GCC dengan peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan sebagai indikasi penguatan identitas bersama.

Namun, dalam menyatukan visi keamanan Kawasan terdapat beberapa tantangan karena beberapa negara GCC masih lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya, seperti kebijakan luar negeri Qatar yang sering bertentangan dengan Arab Saudi dan UEA terkait hubungan dengan Iran dan Turki (Tığlıoğlu, p. 87, 2023). Di tingkat masyarakat, media dan kebijakan domestik masing-masing negara juga turut membentuk persepsi identitas GCC. Selama krisis 2017, kampanye media telah memperburuk fragmentasi identitas regional. Meskipun revitalisasi GCC memberikan kemajuan, upaya lebih besar masih diperlukan untuk menyatukan visi

keamanan kawasan.

Revitalisasi GCC pasca-Al-Ula *Summit* telah membawa perubahan dalam sistem keamanan regional, namun masih terdapat beberapa tantangan. *Boundary* GCC tetap rapuh karena pengaruh eksternal dari Iran dan Amerika Serikat. *Anarchic structure* bertahan dengan Arab Saudi dan Qatar sebagai dua kekuatan utama, Arab Saudi berusaha menjaga posisi sebagai pemimpin regional, sementara Qatar meningkatkan pengaruhnya melalui diplomasi fleksibel dan dukungan dari aktor luar seperti Turki dan Iran. Pada variabel *Polarity* terjadi pergeseran menuju multipolaritas dengan meningkatnya peran UEA dalam kebijakan luar negeri dan menciptakan keamanan yang lebih terfragmentasi. Disisi lain, *social construction* GCC masih dalam proses, dengan perbedaan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional yang menghambat pembentukan identitas keamanan kolektif yang lebih kuat.

Rekonsiliasi GCC pasca-Summit Al-Ula membawa perubahan penting dalam politik dan keamanan Teluk, meskipun masih terdapat hambatan seperti perbedaan kepentingan nasional dan pengaruh eksternal. Penelitian yang berfokus pada periode 2017-2021 ini, mengevaluasi revitalisasi hubungan GCC melalui kebijakan diplomatik, ekonomi terbuka, dan moderasi hubungan dengan Iran sebagai indikator keberhasilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan diplomatik membaik, tantangan struktural dalam keamanan Teluk masih perlu dipantau lebih lanjut. Dalam hal ini keberlanjutan kerja sama GCC, dinamika geopolitik global, dan perubahan kebijakan luar negeri masing-masing negara akan terus mempengaruhi stabilitas kawasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas revitalisasi hubungan diplomatik negara-negara *Gulf Cooperation Council (GCC)* pasca-Al-Ula *Summit* 2021 dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan kawasan Teluk. Dengan menggunakan *Regional Security Complex Theory (RSCT)* sebagai kerangka teoritis utama, penelitian ini menganalisis peran faktor keamanan, dinamika

politik, dan kepentingan ekonomi dalam membentuk pola hubungan GCC pasca-konflik 2017–2021. Selain itu, penelitian ini mengkaji sejarah hubungan antarnegara GCC serta faktor geopolitik yang mendorong rekonsiliasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Al-Ula Summit* berhasil meredakan ketegangan diplomatik dan memulihkan komunikasi yang sebelumnya terhambat oleh blokade Qatar. Namun, revitalisasi hubungan ini belum sepenuhnya menjamin stabilitas jangka panjang karena masih adanya fragmentasi kepentingan nasional, pengaruh eksternal seperti Iran dan AS, serta perbedaan kebijakan luar negeri antar anggota GCC. Oleh karena itu, meskipun rekonsiliasi ini membawa dampak positif, stabilitas kawasan tetap bergantung pada penguatan kerja sama dan diplomasi kolektif antar negara *Gulf Cooperation Council (GCC)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Notodewo, Y. M. "Analisis Normalisasi Hubungan Arab Saudi Dengan Qatar Tahun 2021." *JISI* Vol 2 No. 3 (2022) 56-69.
- Alkuwari, Alhala Hassan. "What is the role of the United States in the GCC crisis in 2017?." (2020).
- Asmahan Carjouli. (2021). "Key points from Al-Ula declaration 'unity' statement." Diakses pada 23 Januari 2025. <https://dohanews.co/key-points-from-al-ula-declaration-unity-statement/>
- Bouoiyour, Jamal, and Refk Selmi. "The Qatar-Gulf crisis and risk management in oil and gas markets." (2019).
- Buzan, Barry, and Ole Waever. *Regions and powers: The structure of international security*. Vol. 91. Cambridge University Press, 2003.
- Christie, John. "History and development of the Gulf Cooperation Council: A brief overview." *The Gulf Cooperation Council* (2019): 7-20.
- Fahlander, P. (2011). *Regional Security in the Persian Gulf*. Lund, Sweden: Lund University.
- Frank Gardner. (2021). "Qatar crisis: Saudi Arabia and allies restore diplomatic ties with emirate". BBC. Diakses pada 20 Januari 2025. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55538792>
- Gause III, F. Gregory. "Structural Impediments to Iranian-Gulf Arab Reconciliation." *Middle East Institute* 9 (2022): 27.
- Griffiths, Martin. "International relations theory for the twenty-first century." London and New York: Routledge (2007).
- John W. Creswell, "Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches-Third Addition" (London: SAGE Publications Ltd, 2009).
- Kabalan, Marwan. (2021). "The Al-Ula GCC Summit." *Insight Turkey* 23.1, 51-

59.

- Mardalis. *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*. Bumi Aksara, 1995.
- Marwan Kabalan. "The Al-Ula GCC Summit." *Insight Turkey* 23.1 (2021): 51-59.
- Miller, Rory. Miller, Rory. (2019). "Managing regional conflict: the Gulf cooperation council and the embargo of Qatar." *Global Policy* 10, 36-45.
- McGlinchey, Stephen, Rosie Walters, and Christian Scheinpflug. "International relations theory." *E-International Relations* (2017).
- Quitow, Rainer, DKK. (2021) "The COVID-19 crisis deepens the gulf between leaders and laggards in the global energy transition." *Energy Research & Social Science* 74. 101981.
- Roberts, David B., ed. *Reflecting on the GCC Crisis: Qatar and Its Neighbours*. Routledge, 2022.
- Siahaan, Munawir. (2023). "Kebijakan Arab Saudi Mengakhiri Blokade Qatar Tahun 2021." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9.2, 206-221
- Smith, Matt. (2019). "Bagaimana Qatar mengatasi embargo ekonomi?." *BBC.com*. diakses pada 20 Januari 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46895688>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2006.
- Tıglioğlu, Saliha Kübra. (2023). *From the qatar blockade to the al-ula summit: three levels of analysis approach*. MS thesis. Middle East Technical University.
- Ulrichsen, Kristian Coates. (2021). "Analysis: Has the Gulf reconciled after the Qatar blockade?." *Al Jazeera*. Diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.aljazeera.com/features/2021/6/5/has-the-gulf-reconciled-after-the-end-of-the-qatar-blockade>.
- Ulrichsen, Kristian Coates. "Missed opportunities and failed integration in the GCC." *The GCC Crisis at One Year: Stalemate Becomes New Reality*. Washington DC: Arab Center (2018).
- Waltz, Kenneth N. "The anarchic structure of world politics." *International politics: enduring concepts and contemporary issues* (1979): 29-49.
- Yousef, T. K. (2022). "The COVID-19 pandemic in the Gulf: Impact, Response, and Implications." *Middle East Council of Global Affairs*. Policy notes.